

BAB II

DINAMIKA KONFLIK LEBANON

Bab ini membahas mengenai hubungan Negara Libanon dengan Negara Israel yang bertetangga namun selalu berkonflik. Kelahiran Hizbullah dan keterlibatannya di dalam pemerintahan Libanon membuat konflik Israel-Libanon ini semakin kompleks. Sebelum ke pembahasan inti tersebut, bab ini terlebih dahulu membahas posisi geografis Israel dan Libanon. Ini dipaparkan pada sub bab di bawah ini.

A. Sejarah Perang Libanon-Israel

Pada bulan Juni 1967, Libanon mulai melibatkan diri dalam perang Arab- Israel. Libanon yang berbatasan langsung dengan Israel, tidak lepas dari dampak upaya ofensif dan serangan militer yang dilakukan negara-negara Arab. Lebih- lebih Libanon menjadi salah satu tempat penampungan ribuan pengungsi Palestina, yang tinggal di kamp-kamp darurat. Penduduk Palestina ketakutan dan melarikan diri dari Palestina. Selain menjadi tempat bagi para pengungsi, Libanon 34 juga menjadi tempat bagi milisi Palestina (terutama Libanon Selatan). Sejak itu, Libanon menjadi sasaran serangan-serangan Israel.

Tahun 1968, Israel meledakkan tiga belas pesawat di Bandara Internasional Beirut dan beberapa desa lainnya sebagai balasan atas sebuah serangan dua prajurit Front Pembebasan Rakyat Palestina terhadap sebuah pesawat Israel di Athena. Pada tahun itu juga, pemerintah Libanon memperbolehkan terbentuknya milisi-milisi rakyat Palestina bersenjata untuk melancarkan perlawanannya terhadap Israel tanpa mengganggu kedaulatan dan kesejahteraan Libanon dengan menandatangani “Kesepakatan Kairo” (Koya, 2006).

Pada tanggal 14-15 Maret 1978, Israel melakukan invasi ke Lebanon sampai ke sebelah utara Sungai Litani. Alasan Israel melakukan invasi adalah sebagai balasan atas serangan orang-orang Palestina ke wilayah Israel yang banyak dilakukan dari tanah Lebanon. Israel berdalih bahwa selama Lebanon menjadi basis perlawanan bagi orang-orang Palestina, perdamaian Israel dan Timur Tengah tidak akan pernah tercapai. Israel ingin mengontrol upaya perlawanan kelompok gerilyawan garis keras dengan menginvasi Lebanon (Koya, 2006).

Pada April 1981, dua helikopter Suriah yang terbang di atas Lebanon, tepatnya di Bakaa Valley, Lebanon Selatan, ditembak jatuh oleh Israel. Militer Suriah dianggap oleh Israel memperkuat kelompok-kelompok bersenjata yang ada di Lebanon. Di beberapa wilayah Lebanon Selatan, di daerah perbatasan antara Israel dan Lebanon, Israel tetap menolak dan menarik pasukannya. Israel bahkan semakin gencar melakukan pengeboman di wilayah-wilayah desa di pantai Lebanon. Pada 6 Juni 1982, Israel kembali melakukan invasi ke Lebanon dalam salah satu operasinya yang disebut Operation Peace for Galilee. Israel melaksanakan operasi ini dengan tujuan menghancurkan kekuatan PLO, sekaligus mempertahankan rancangan tentang konsep Galilee tahun 1963 guna memperluas wilayahnya 40 kilometer ke sebelah utara perbatasannya ke arah Lebanon.

Pada bulan Januari-Februari 1994, Israel kembali melakukan serangan Udara terhadap basis PFLP di selatan Beirut. Serangan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi gerakan Palestina itu, namun beberapa bangunan permukiman warga sipil juga menjadi korban. Bahkan, pada bulan Februari empat prajurit Israel tewas setelah mendapat serangan dari Hizbullah di Lebanon Selatan. Dalam setiap

perang, Israel selalu menghitung setiap kerugian prajuritnya. Israel merespon serangan Hizbullah melalui serangan udara Israel ke beberapa lokasi kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan. Pesawat-pesawat udara Israel melakukan patroli udara untuk mengejar gerilyawan Hizbullah di beberapa kampung dan pegunungan di Lebanon Selatan.

Pada Maret 1994, tujuh orang anggota South Lebanon Army (SLA) terbunuh sebagai pembalasan Israel atas jatuhnya korban beberapa personel pasukan Israel. SLA, sebagai salah satu kekuatan militer yang ada di Lebanon Selatan, dianggap bekerjasama dengan Hizbullah untuk melakukan berbagai penyerangan terhadap pasukan Israel. Selain itu, dua warga sipil Lebanon, saat 36 sedang membangun sebuah menara air di Yater, juga menjadi korban pembunuhan oleh pasukan bersenjata Israel. Pada April 1996, Israel meluncurkan Operation Grapes of Wrath di Lebanon. Operasi ini diawali dengan menjatuhkan beberapa bom di Bairut bagian selatan, Bekaa, dan Nabatiyeh. Ada 147 desa dan kota yang menjadi target pengeboman pesawat Israel. Lebih dari 400 ribu warga Lebanon mengungsi. Israel juga melakukan blokade terhadap wilayah perairan Lebanon dengan armada lautnya. Serangan Israel juga menghantam sebuah ambulan yang berisi empat orang anak dan dua orang wanita Lebanon. Serangan yang dilakukan Israel juga mengancam keberadaan pasukan PBB. Dua buah peluru artileri jatuh di posisi pasukan PBB di Qana, Lebanon Selatan. Adapun korban yang tewas oleh pengeboman pesawat Israel di Qana mencapai jumlah 105 orang, termasuk wanita dan anak-anak. Pengeboman itu dilakukan saat penduduk Lebanon sedang berada di rumah-rumah mereka. Serangan tersebut mengundang reaksi dan

kecaman dari dunia internasional maupun masyarakat internasional. Secara keseluruhan jumlah korban yang tewas di Lebanon pada periode itu mencapai 200 orang warga sipil Lebanon dan 15 orang pejuang Hizbullah. Mereka kebanyakan menjadi korban pengeboman udara (Koya, 2006).

Pada tanggal 24 Mei 1999, Israel kembali melakukan serangan terhadap infrastruktur sipil Lebanon di dekat Tripoli. Serangan itu dimaksudkan oleh Israel sebagai upaya menekan pemerintah Lebanon dalam melakukan kontrol terhadap keberadaan Hizbullah. Keberadaan Hizbullah telah mengancam eksistensi Israel di kawasan itu. Serangan yang dilakukan secara mengejutkan itu tidak membuat pemerintah Lebanon mengubah sikapnya terhadap keberadaan Hizbullah. Pemerintah Lebanon berpendapat bahwa mengusik keberadaan Hizbullah hanya akan menimbulkan konflik antar kelompok di Lebanon.

Hingga pada tahun 2006, Israel kembali melakukan konflik dengan Lebanon. Sebuah konflik yang berawal dari serangkaian tindakan militer dan bentrokan terus-menerus di Israel utara dan Lebanon yang melibatkan sayap bersenjata Hizbullah dan Angkatan Pertahanan Israel (*Israel Defence Force* atau IDF). Konflik ini berawal pada tanggal 12 Juli 2006, ketika Hizbullah menyerang kota Shlomi di Israel utara dengan rudal Katyusha, kemudian pasukan Hizbullah menyusup ke wilayah Israel. Dalam serangan tersebut, tiga pasukan Israel terbunuh, dua luka-luka, serta dua diculik. Peristiwa ini kemudian berlanjut dengan serangan Hizbullah ke wilayah Israel yang menghasilkan delapan orang tentara Israel tewas dan melukai lebih dari 20 orang. Israel kemudian membalas serangan Hizbullah dengan

Operasi *Just Reward* ("Balasan yang Adil"), yang lalu namanya diubah menjadi Operasi *Change of Direction* ("Perubahan Arah"). Serangan balasan ini meliputi tembakan roket yang ditujukan ke arah Lebanon dan pengeboman oleh Angkatan Udara Israel (IAF), blokade Udara dan Laut serta beberapa serangan kecil ke dalam wilayah Lebanon selatan oleh tentara darat IDF (Koya, 2006). Inilah serangkaian peristiwa konflik yang terjadi antara Israel-Lebanon hingga peristiwa 2006 yang mengharuskan PBB mengeluarkan Resolusi 1071 yang menandai kegagalan Israel dalam perang Lebanon.

B. Lebanon Selatan dalam Konflik Lebanon-Israel

Negara Libanon dan Israel terletak di kawasan Timur Tengah. Negara Libanon sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan. Libanon terletak di sepanjang pantai Timur Laut Mediterania dengan pesisir pantainya yang sempit di bagian barat. Libanon berbatasan dengan Negara Israel di bagian Selatan, sedangkan di bagian Utara dan Timur, berbatasan dengan Negara Suriah (Lebanon Embassy US, 2013). Libanon memiliki luas wilayah 10.400 km diantaranya 217 km dari Utara ke Selatan Libanon dan 80 km dari Timur ke Barat Libanon (IBCR 2011:13).

Jumlah penduduk Libanon tercatat 4.131.583 jiwa (CIA, 2013). Mayoritas penduduk Libanon bertempat tinggal di Beirut (ibu kota) dan Mount Libanon, sementara sisanya tersebar di empat propinsi lainnya yaitu 20,5% di Libanon utara, 12,5% di Bekaa, 10,7% di Libanon selatan, dan 5,9% di Nabatieh.



Gambar 1 Peta Negara Lebanon

Wilayah Libanon dibagi menjadi enam propinsi yaitu Beqaa, Beirut, Libanon Utara, Mount Liban, Libanon Selatan, dan Nabatiye (State Gov 2013:1). Konstitusi Libanon mengikuti konstitusi yang dibuat tahun 1926 dan kemudian disesuaikan dengan Kesepakatan Nasional tahun 1943 dan Perjanjian Thaif tahun 1982. Kesepakatan Nasional tahun 1943 direvisi berdasarkan isi perjanjian Taif tersebut dan hasilnya menjadi Undang-Undang Dasar Libanon. Kekuasaan Eksekutif berada di tangan Presiden, Perdana Menteri, dan Kabinet

(Lebanese Constitution, 1995). Sementara kekuasaan Legislatif berada di tangan Parlemen atau Majelis Al-Nuwab yang memiliki 128 anggota.

Penduduk Libanon terdiri dari beragam etnis dan agama yang diantaranya adalah etnis Arab dan Armenia; agama Islam (Syiah, Sunni, Druze) dan Kristen. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, Prancis, Inggris, dan Armenia. Penduduk Libanon terbagi atas tiga faksi besar, yakni kelompok Muslim Sunni, kelompok Muslim Syia'ah, dan kelompok Kristen Maronite, serta banyak faksi-faksi kecil dalam masyarakat berdasarkan suku, agama, maupun ketokohan orang per orang (Lebanon Ethnic Group, 2013).

Oleh karena itu dibentuk sistem politik konfessional yang dianggap dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan faksi-faksi yang ada dengan membagi kekuasaan politik pada tiga kelompok besar dan kelompok kecil masyarakat tersebut. Kekuasaan Presiden berada di tangan kelompok Kristen Maronite, kelompok Muslim Sunni menjadi Perdana Menteri, sedangkan kelompok Muslim Syi'ah hanya menjadi juru bicara parlemen (Angkasa, 2006:35). Negara Libanon merdeka pada tanggal 22 November 1943 dari mandat Liga Bangsa-Bangsa di bawah administrasi Perancis (LGIC, 2013). Libanon merupakan Negara Republik. Kekuasaan Eksekutif berada di tangan Presiden, Perdana Menteri, dan kabinet. Konstitusi yang didasarkan pada pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, dengan presiden dipilih untuk jangka waktu enam tahun. 128 anggota parlemen dipilih oleh hak pilih universal dewasa untuk masa jabatan empat tahun (CIA, 2013).

Sedangkan Negara Israel berbatasan dengan Negara Libanon di sebelah Utara, di sebelah Timur laut dengan Negara Suriah, di sebelah

Timur dengan Negara Yordan, di sebelah Barat daya dengan Negara Mesir dan Laut Mediterania (MFA 2013). Negara Israel memiliki luas wilayah 8.630 km². Teritorialnya seluas 8,367 km² adalah berupa daratan dengan panjang 470 km² dan lebar 85 km². Israel dibagi menjadi tiga wilayah utama yang memanjang yaitu, dataran pantai, wilayah pegunungan, dan celah lembah Yordan (Go Israel 2011).



Gambar 2 Peta Negara Israel

Jumlah penduduk Israel tercatat 8.018.000 jiwa (CBS 2013). Mayoritas penduduk Israel bertempat tinggal di Jerussalem (Ibu kota)

730.000, sementara sisanya tersebar di beberapa daerah lainnya yaitu Haifa (268.250), Hadera (75.300), Netanya (169.400), Herzliya (83.000), Ra'anana (70.500), Kfar sava (79.800), Bnei brak (142.300), Metulla (1.500), Tel aviv (371.400), Kiryat Gat (47.800), Tiberias (39.900), Nazareth (63.800) (State Gov 2010). Penduduk Israel terdiri dari beragam etnis dan agama yang diantaranya adalah etnis Yahudi dan arab; agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani dan Arab (Nation online 2013).

Negara Israel merdeka pada 14 Mei 1948 dari Britania Raya (PBS 2013). Israel merupakan Negara Republik demokrasi dengan sistem parlementer. Sistem kekuasaannya terbagi menjadi tiga, yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Consuladode Israel, 2013). Presiden dipilih oleh Knesset sebagai kepala Negara untuk jangka waktu 7 tahun, namun tugas-tugasnya hanya sebatas seremonial dan formal (Jewish virtual library, 2013). Tugas lain dari Presiden adalah membuka sesi pertama dari Knesset baru, mengarahkan anggota Knesset untuk membentuk pemerintah baru, menerima mandat dari utusan asing, menandatangani traktat dan undang-undang yang diadopsi oleh Knesset, perwakilan diplomatik di luar negeri, hakim, dan Gubernur Bank of Israel (MFA, 2010).

Knesset adalah badan legislatif Negara Israel. Masa jabatan Knesset adalah 4 tahun, tetapi dapat berubah tergantung dari keputusan Perdana Menteri. Perdana Menteri dipilih dan didukung oleh anggota parlemen secara mayoritas. Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan dan juga menjabat sebagai ketua kabinet (Darlington 2013). Israel diperintah oleh 120 anggota parlemennya, yang dikenal sebagai Knesset. Anggota-anggota Knesset berasal dari berbagai partai

yang dipilih dalam pemilihan parlemen. Di dalam pemerintahan tersebut, yang terbentuk adalah pemerintahan dengan sistem koalisi. Pemilihan parlemen diadakan setiap empat tahun sekali, namun koalisi pemerintahan yang tidak stabil ataupun adanya mosi tidak percaya oleh Knesset dapat membubarkan pemerintahan yang ada lebih awal (Knesset 2013). Kewenangan eksekutif negara adalah pemerintah (kabinet para menteri). Kabinet membentuk sebuah pemerintahan, daftar menteri untuk di setujui oleh Knesset. Menteri harus dari warga negara Israel, dan berhak menjadi seorang Knesset. Setelah pelantikan, para menteri bertanggung jawab kepada Knesset atas tugas yang telah diberikan. Seperti halnya Knesset, masa jabatan menteri adalah 4 tahun. Apabila dalam pelaksanaan tugasnya mengalami permasalahan yang diantaranya: meninggal, mengalami kecacatan, impeachment, dan pengunduran diri, maka jabatan menteri akan dikurangi (MFA 2010). Konflik diantara Israel dan Libanon bermula pada tahun 1978, ketika Palestine Liberation Organization (PLO) terusir dari Negara Yordania dan menjadikan Libanon Selatan sebagai tempat pengungsian (Tur 2006). PLO kerap melakukan serangan roket ke wilayah Israel yang dilakukan dari wilayah Libanon Selatan. Ini dilakukan sebagai balasan atas pengambilan wilayah Palestina oleh Negara Israel. Setelah itu, Israel melakukan invasi ke Lebanon Selatan pada 14 Maret 1978.

Konflik dua negara ini mulai membahayakan Libanon Selatan sejak tahun 1978. Ini dikarenakan para pejuang PLO masih melakukan aksi serangan kepada pasukan Israel dari daerah perbatasan Libanon Selatan ke wilayah Israel Utara. Pada 19 Maret 1978, atas permintaan pemerintah Libanon yaitu Alias Syarkis, melalui Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 425 yang bertujuan untuk mendesak

pasukan Israel agar segera keluar dari wilayah Libanon. Kemudian, PBB membentuk badan yang mengawasi pelaksanaan resolusi tersebut, yaitu United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). UNIFIL bekerja untuk mengawasi penarikan pasukan Israel secara keseluruhan dan mendorong perdamaian di wilayah Libanon (UN 2013). Sementara itu, Israel membentuk sebuah milisi Kristen Libanon di bawah pimpinan Mayor Sa'ad Haddad untuk mengimbangi kekuatan PLO di Libanon. Tindakan tersebut mendapatkan perlawanan dari pemerintah Libanon. Haddad dianggap sebagai penghianat Negara dan ia dipecat dari angkatan bersenjata Libanon (Ari Yulianto 2010:61).

PLO meresponnya dengan memperbanyak pasokan senjata modern yaitu seperti roket Katyusa, serta artileri jarak jauh (Country Studies US 2012). Senjata tersebut dipakai untuk menembaki wilayah Israel. Pada bulan Juli tahun 1981, PLO melakukan serangan roket dan artileri ke kota Israel bagian utara yaitu Galilea. Israel membalas dengan menghancurkan markas PLO di Beirut dengan bom. Kemudian, atas prakarsa utusan dari Amerika yaitu Philip Habib dan mediasi dari Arab Saudi, tercapailah gencatan senjata antara Israel dengan PLO (ISR 2006).

Namun, gencatan senjata itu tidak berlangsung lama. Konflik masih terus berlangsung pada 6 Juni tahun 1982. Israel pun kembali melakukan operasi yaitu Operations Peace of Galilee. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kekuatan PLO di Libanon sekaligus mempertahankan rancangan tentang Konsep Galilee yaitu memperluas wilayah kekuasaan 40 km ke sebelah utara perbatasan Libanon (Israel National News 2012). Dalam operasi ini, Israel dibantu oleh milisi Kristen Maronite di bawah pimpinan Bashir al-Jumayyil. Namun,

upaya untuk melakukan operasi tersebut terhalang oleh resolusi yang dikeluarkan oleh PBB yaitu resolusi Dewan keamanan PBB 509 yang menyatakan bahwa Israel harus segera menarik seluruh pasukannya dari Libanon (UN 1982). Namun, Israel tetap tidak memperdulikan resolusi tersebut dan tetap melaksanakan operasi tersebut hingga 13 Juni 1982. Dalam melakukan operasi tersebut, Israel menggunakan cluster bomb, rudal dengan campuran zat kimia berbahaya, dan bom napalm untuk menyerang wilayah Beirut bagian barat yaitu Sidon dan Tyre (New York Times 2006).

Wilayah tersebut hancur, sehingga perekonomian Libanon menjadi lumpuh tidak beroperasi. Ini membuat pemerintah Libanon tidak berani tegas terhadap Negara Israel. Hingga tahun 1999, konflik ini masih terus berlangsung dan menimbulkan kerusakan serta korban jiwa yang cukup banyak, baik di pihak Libanon maupun di pihak Israel. Sekitar 50.000 warga Palestina dan Libanon meninggal, 30.130 orang luka-luka, 330 orang pasukan Israel meninggal, dan 1000 orang terluka (John, 1982).

Ini disebabkan oleh tentara Libanon tidak mampu mengimbangi kekuatan militer Israel. Pasukan Israel menggunakan senjata-senjata yang lebih modern daripada tentara Libanon. Israel lebih banyak melancarkan serangan lewat udara dengan pesawat tempur andalannya yang dilengkapi oleh rudal-rudal berteknologi mutakhir. Ini lebih menguntungkan Israel untuk meminimalisir kerugian di pihaknya. Terdapat setidaknya delapan kelompok para militer aktif di Libanon yang anti kepada Israel. Kelompok ini yaitu Fatah, Hamas, Osbat al-Ansar, Amal, Jund al-Sham, PF3-GC, PLO, Fatah al-Islam, dan Hizbullah (Yulianto, 2010:53). Di antara yang anti Israel, Hizbullah

yang mendapat posisi tersendiri di dalam negeri. Sedangkan, di mata internasional karena memerangi Israel dengan seranga ke area sipil, Hizbullah di kategorikan sebagai teroris.

C. Konflik Israel-Hizbullah

Pendirian Hizbullah didasari oleh keprihatinan sejumlah ulama terhadap invasi Israel ke Libanon selatan pada tahun 1982. Para ulama tersebut adalah Ayatullah Muhammad Mahdi Syamsuddin, Ayatullah al-Sayyed Muhammad Hussein Fadhlullah, dan Imam Musa al-Sadr. Mereka menjalani pendidikan di sekolah-sekolah teologi di Najaf Irak. Salah satu ulama tersebut adalah Ayatullah al-Sayyed Muhammad Hussein Fadhlullah (Riza: 37). Fadhlullah dilahirkan dan belajar di Najaf, dimana ayahnya adalah seorang cendekiawan dari Libanon selatan. Pada tahun 1966, Fadhlullah pulang ke Libanon dan membuat sebuah perubahan pada Husayniyyah (lembaga pendidikan Syiah) di Beirut menjadi sebuah pusat pergerakan Islam Libanon. Pada masa itu, gerakan Syiah di Libanon di pimpin oleh Sayyed Musa al-Sadr, dan Fadhlullah sebagai pengikutnya.

Musa al-Sadr mendirikan Afwaj al-Muqawwamah al-Lubnaniyah atau yang dikenal dengan AMAL pada saat perang saudara Libanon berlangsung tahun 1975 (Naim 2008:17). AMAL mempunyai beberapa anggota yang diantaranya adalah Ayatullah al-Sayyed Muhammad Hussein Fadhlullah, Sheik Sayyed Hassan Nasrallah, Sheik Abbas al-Musawi, Ali Ammar, Hussein al-Khalil, dan Nabih Berri (Abdarrahman Koya 2006:16). Tujuan didirikannya AMAL adalah untuk membantu tentara Libanon melawan pasukan Israel dalam perang saudara Libanon yang sedang berlangsung di tahun 1975. Namun, beliau tidak dapat meneruskan tujuannya tersebut, karena pada

tahun 1978 beliau diculik ketika sedang menghadiri perayaan nasional yang diadakan oleh Presiden Muammar al- Qaddafi di Libya (Naim 2008:18).

Sampai saat ini keberadaan beliau belum diketahui. Pada tahun 1982, Presiden Libanon di masa itu Ilyas Sarkis mendirikan Komite Penyelamatan Nasional dengan tujuan untuk menangani dampak invasi Israel di Libanon selatan. Kemudian, Ilyas Sarkis mengadakan rapat Komite Penyelamatan Nasional dengan mengundang anggota AMAL (Abdarrahman Koya 2006:15). Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan argumen yang disebabkan oleh salah satu anggota yaitu Nabih Berri datang bersama dengan panglima militer Phalangis Bashir Jumayyil yang mendukung Israel berada di Libanon (Diplomasi 2010:8).

Para anggota AMAL melakukan protes kepada Berri atas tindakannya tersebut dengan mengundurkan diri dari organisasi AMAL. Anggota yang mengundurkan diri dari AMAL diantaranya, Ayatullah al-Sayyed Muhammad Hussein Fadhlullah, Sheik Sayyed Hassan Nasrallah, Sheik Abbas al-Musawi, Ali Ammar dan Hussein al-Khalil. Beberapa orang anggota AMAL mencurigai bahwa Berri telah melakukan kerjasama dengan Israel melalui tangan Bashir. Kemudian dari beberapa orang yang keluar dari AMAL masing-masing membentuk kelompok sendiri yang diantaranya; Sheik Abbas al-Musawi mendirikan kelompok dengan nama Gerakan Amal Islam dan Ayatullah al-Sayyed Muhammad Hussein Fadhlullah mendirikan Perhimpunan Persaudaraan serta Perhimpunan Organisasi Filantropik (Naim 2008:20). Pada tahun 1982 terjadi dua peristiwa besar yaitu perang saudara dan pembantaian di Sabra dan Shatila Libanon selatan.

Peristiwa tersebut membuat sejumlah kelompok ulama marah dan prihatin karena 100.000 penduduk Libanon terbunuh (Global Research 2013). Kemudian, sejumlah ulama yang terdiri dari sembilan perwakilan diantaranya; tiga orang mewakili ulama dari Bekaa (Libanon timur), tiga orang mewakili komite Islam, dan tiga orang lagi mewakili Gerakan amal Islam (Naim 2008:24).

Mereka berkumpul bersama untuk menyatukan visi misi dengan membubarkan organisasi mereka demi mendukung sebuah organisasi Islam baru, yang kemudian dikenal sebagai "Hizbullah". Tujuan didirikannya Hizbullah adalah untuk mengusir pasukan Israel dari Libanon. Hizbullah baru diperkenalkan oleh Sheik Ibrahim al-Amin secara luas pada 16 Februari 1985 ketika memperingati satu tahun wafatnya Sheik Ragheb Harb yang merupakan pemimpin perlawanan kelompok Syiah (Robert G. Rabil 2012). Sheik Ibrahim al-Amin menegaskan bahwa Hizbullah akan mengusung semangat Revolusi Islam Iran dalam pemerintahan di Libanon. Sebagian besar kegiatan Hizbullah diarahkan ke berbagai kegiatan sosial, politik, dan kenegaraan.

Sejarah konflik Israel-Hizbullah dimulai pada tahun 1982 setelah kelahiran Hizbullah yang bertepatan dengan Perang saudara. Hizbullah merasa prihatin terhadap kondisi yang sedang dialami oleh masyarakat Libanon saat itu dan Hizbullah tidak bisa tinggal diam atas serangan pasukan Israel ke wilayah Libanon. Hizbullah kemudian bersama-sama dengan kaum Syiah lainnya dan Suriah berperang melawan pasukan Israel di Libanon. Kemudian, tahun 1983 dengan adanya tekanan dari masyarakat internasional melalui protes yang dilakukan di seluruh dunia, Israel mundur ke sungai Awali di Libanon (James Kelly 1983).

Pada bulan November 1983, terjadi bom bunuh diri yang dilakukan oleh pejuang Syiah di dekat markas pasukan Israel di kota Tyre Israel. Peristiwa ini menewaskan 60 orang yang termasuk di dalamnya pasukan Israel. Setelah kejadian tersebut, tahun 1985 pemerintah Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shimon Peres memutuskan untuk menarik mundur pasukan Israel ke wilayah Libanon selatan (The US Army 2006). Beberapa tahun kemudian terjadi serangan lagi yang dilancarkan oleh pasukan Israel pada tahun 1988 di Maydun basis Hizbullah (New York Times 1988). Pasukan Israel menyerang wilayah Libanon selama 3 hari. Namun, penyerangan yang dilakukan pasukan Israel justru menambah peningkatan serangan Hizbullah ke wilayah Israel. Setelah itu, berkat mediasi negara Arab Saudi, perang saudara yang telah berlangsung selama 15 tahun berakhir. Berakhirnya perang saudara di Libanon, tidak menghentikan perang antara Israel dengan Hizbullah.

Pasukan Israel melancarkan serangan ke wilayah Libanon selatan yang menjadi basis Hizbullah. Tujuannya untuk menghancurkan kekuatan Hizbullah agar dapat menarik simpati rakyat Libanon, karena dengan keberadaan Hizbullah nasib rakyat Libanon terancam. Namun, serangan yang dilakukan Israel menimbulkan kebencian rakyat Libanon terhadap Israel. Perlawanan Hizbullah menjadi semakin meningkat dengan membalas serangan ke wilayah Israel utara. Pada bulan Juli 1993 Israel kembali melancarkan serangan akuntabilitas dengan tujuan agar penduduk Libanon selatan mengungsi dan pindah ke utara kota Beirut (Global Security, 2013).

Hingga tahun 1996 pasukan Israel masih melancarkan serangan ke wilayah Libanon. Pada tahun 1999 menjelang penarikan mundur

Israel tahun 2000, pejuang Hizbullah intens mengadakan operasi perlawanan untuk menyerang pasukan Israel. Pada tahun 2000, ketika Perdana Menteri Ehud Barak terpilih dalam pemilu, ia memutuskan untuk menarik pasukan Israel dari wilayah Libanon sebagai realisasi janjinya kepada rakyat Israel saat Pemilu. Penarikan mundur tentara Israel ini merupakan kemenangan terbesar bagi Hizbullah (Naim, 2008:187-188).

D. Dampak Konflik Lebanon-Israel

Konflik antara Negara Israel dengan Hizbullah telah menimbulkan dampak buruk bagi kedua Negara Israel dan Libanon yaitu hancurnya infrastruktur, pencemaran lingkungan, menimbulkan korban jiwa (luka-luka dan meninggal dunia), pengungsian, dan kerugian finansial.

1. Dampak Konflik pada Lebanon

Selama perang berlangsung, bukan hanya infrastruktur saja yang hancur menjadi korban serangan pasukan Israel, namun juga korban jiwa berjatuhan. Berbagai sumber telah di dapatkan berikut ini penjelasannya:

- a. Korban jiwa: lebih dari 1.100 warga Libanon meninggal dunia, 4.000 orang luka-luka, 65 orang pasukan Hizbullah meninggal dunia (Ganon, 2006), dan lebih dari satu juta warga Libanon mengungsi selama perang (Andriy Shevtsov 2007). Menurut data dari BBC, 1.125 orang warga Libanon meninggal dunia (BBC 2007). Selama perang berlangsung, terjadi pula pembunuhan massal yang diakibatkan oleh bom dari pesawat tempur Israel yang telah menewaskan 1.123 orang dalam pembunuhan di Qana. Jumlah itu terdiri dari 37 orang tentara Libanon dan Polisi, 894

orang warga sipil yang identitasnya jelas dan 192 tanpa identitas. Sedangkan untuk data korban luka-luka berjumlah 4.409 orang.

- b. Kerusakan infrastruktur: Kerugian diterima oleh Negara Libanon membuat kondisi negara ini lumpuh total. Bantuan dari negara-negara tetangga tidak dapat masuk, sehingga penduduk Libanon mengalami kelaparan, kedinginan, dan penderitaan yang cukup lama. 80 jembatan, 900 pabrik, bandara, sekolah, rumah sakit, sarana umum, rumah ibadah, stasiun televisi, pelabuhan laut, dan lebih dari 15.000 rumah hancur.
- c. Kerusakan lingkungan: Sebuah tumpahan minyak besar dari pemboman tangki bahan bakar yang berada di dekat pembangkit listrik Jiyeh mengakibatkan pantai di Libanon dan beberapa negara tetangga tercemar. Pemboman yang dilakukan Israel menyebabkan pencemaran hidrokarbon, pencemaran air tanah. Bahaya lain yang ditimbulkan dari pemboman tersebut adalah polusi udara. Karena, asap yang membakar bahan bakar minyak tersebut terus berlangsung selama 27 hari. Sehingga menyebabkan sejumlah polutan ke atmosfer, termasuk karbon monoksida dan metana yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan. Pencemaran tanah juga terjadi akibat pemboman pabrik deterjen Ghabris di Tyre (Shevtsov, 2007). Bahan kimia dari deterjen tumpah dan meresap kedalam tanah sehingga menyebabkan tanah tidak dapat ditumbuhi oleh tanaman dan kerusakan ekosistem disekitar pabrik tersebut. Selain itu, satu juta bom curah yang belum meledak tersebar di seluruh Libanon (Andriy Shevtsov 2007). Serangan roket Hizbullah mengakibatkan kebakaran 3000 hektar hutan di Israel utara.

2. Dampak Konflik pada Israel

Dalam memperhitungkan jumlah korban perang, Negara Isrel sangat berhati-hati. Ini karena jumlah korban personelnnya akan menunjukkan kredibilitas kemampuan selama berperang dengan Hizbullah. Israel ingin mempertahankan gelarnya sebagai negara yang memiliki kemampuan perang tak terkalahkan. Korban jiwa dari pihak Israel yang didapat dari berbagai sumber adalah sebagai berikut:

- a. Korban jiwa: 43 warga sipil dan 117 tentara IDF meninggal dunia, 1000 orang luka-luka. 300.000 warga Israel yang terlantar dan lebih dari satu juta mengungsi (Shevtsov, 2007). Menurut data dari BBC, 119 tentara IDF meninggal dunia dan 40 warga sipil meninggal dunia (BBC 2007). Data lain dari Jpost menyebutkan 52 orang penduduk sipil meninggal dunia (Jpost 2006). 1.350 orang luka-luka (Ynet News 2006). 300.000 orang mengungsi (Ny Times 2006). Korban dari pihak tentara IDF mencapai 115, 402 orang luka-luka, dan 2 orang ditawan (Jpost 2006).
- b. Kerusakan infrastruktur: lebih dari 300 gedung rusak, termasuk rumah, jalan raya, sekolah, pabrik, sarana umum, rumah sakit, dan apartemen (Farid, 2006:13-38). Ini mengakibatkan Negara Israel sempat lumpuh, tidak dapat beroperasi akibat serangan yang dilakukan oleh pasukan Hizbullah.
- c. Kerugian finansial: kerugian 1,5 milyar untuk rekonstruksi infrastruktur (Stinson, 2006), US\$ 4,8 miliar sebagai total biaya perang yang dikeluarkan oleh negara Israel (Libanon 2006). Kerugian tersebut mengakibatkan 70% bisnis di Negara Israel

Utara terpaksa berhenti beroperasi. Sektor pariwisata Israel juga terpaksa berhenti untuk sementara. Kerugian yang dialami oleh Negara Israel menjadi cambuk di masa depannya untuk memperhitungkan kembali biaya yang akan dikeluarkan jika akan berperang melawan Hizbullah.

E. Gencatan Senjata

Gencatan senjata adalah penghentian perang atau konflik bersenjata apapun untuk sementara di mana kedua belah pihak yang terlibat setuju untuk menghentikan tindakan agresif masing-masing. Konflik antara Israel dengan Hizbullah pada tahun 2006 berlangsung selama 34 hari. Pada tanggal 11 Agustus 2006 Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi 1701 yang menyerukan penghentian serangan antara Israel dengan Hizbullah. Penjelasan Resolusi ini adalah pemerintah Libanon bertugas memberikan jaminan keamanan di perbatasan dan menjaga lebih intensif pos-pos yang berada di perlintasan seluruh wilayah Libanon. Resolusi ini bertujuan untuk menghentikan permusuhan secara menyeluruh diantara Israel dengan Hizbullah dan 15.000 tentara penjaga perdamaian akan menggantikan posisi Israel di Libanon Selatan (Farid 2006:36). Resolusi PBB juga memerintahkan Israel agar mengakhiri seluruh aksinya di wilayah Libanon dan memerintahkan pasukan Hizbullah mengakhiri serangannya. Resolusi tersebut juga menyerukan embargo pengiriman senjata sah, dan memerintahkan pasukan Libanon untuk dikerahkan ke wilayah Libanon selatan guna memperkuat pasukan perdamaian PBB.

Setelah perjanjian gencatan senjata, diberlakukan Status Quo. Status Quo adalah kembali kekeadaan semula. Dalam perjanjian gencatan senjata, disepakati antara pihak yang berperang bahwa, daerah

perbatasan harus dikembalikan ke status quo yaitu keadaan sebagaimana adanya sebelum perang. Ini berarti, kedua pihak yang berperang harus menarik kembali pasukan masing-masing sesuai dengan peta perbatasan yang semula berlaku sah sebelum perang.. Setelah adanya status quo, PBB menjalankan peacekeeping. Menurut PBB, Penjaga perdamaian atau peacekeeping adalah sebuah instrument yang unik dan dinamis yang dikembangkan oleh organisasi sebagai cara untuk membantu negara-negara yang hancur oleh konflik, dan menciptakan kondisi untuk perdamaian abadi. Sementara itu, definisi lain menyebutkan bahwa penjaga perdamaian adalah segala sesuatu yang memberikan kontribusi untuk memajukan proses perdamaian. Penjaga perdamaian itu tidak mutlak adalah tentara, karena pasukan ini tidak berkewajiban untuk terlibat dalam pertempuran sebab pasukan ini tidak diproyeksikan untuk memberikan perlawanan. Pasukan ini ditempatkan pada daerah yang berstatus gencatan senjata yang telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang sedang bertikai. Pada saat inilah ruang untuk mengatasi konflik lewat upaya diplomatik dapat dijalankan. Pasukan penjaga perdamaian memantau dan mengamati proses perdamaian di daerah pasca konflik dan membantu mantan kombatan dalam melaksanakan kesepakatan damai. Bantuan tersebut datang dalam berbagai bentuk, termasuk langkah-langkah membangun rasa percaya diri, pengaturan pembagian kekuasaan, dukungan pemilu, penguatan supremasi hukum, dan pembangunan ekonomi sosial.

Peacekeeping operations adalah operasi PBB di lapangan dimana personil internasional, warga sipil maupun pemerintah diberikan izin berkelompok di bawah komando PBB untuk membantu

mengendalikan dan memecahkan konflik internasional yang nyata terjadi maupun konflik internal yang terjadi serta mempunyai kebebasan internasional (Murphy 2007:2). Operasi penjagaan perdamaian secara sah dilakukan dengan adanya Dewan Keamanan PBB serta persetujuan dari pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat. (UN 2004:72). Sejumlah negara yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB yang dikenal dengan sebutan United Nations Interim Force in Libanon (UNIFIL) mengirimkan wakil dari negaranya ke Libanon. Kehadiran pasukan PBB ke negara Libanon sebenarnya bukan hal yang asing lagi. Sebab, sejak tahun 1978 ketika perang saudara di Libanon, untuk meredakan konflik tersebut, pasukan PBB telah diterjunkan. Sebanyak 50 personel pasukan militer Prancis sudah berada di markas UNIFIL di Naqoura, Libanon Selatan. Negara Prancis merupakan pasukan kelompok pertama yang datang. Mereka adalah sebagian dari 200 personel yang akan dikerahkan untuk menjaga wilayah tersebut. Negara lainnya seperti Finlandia mengirimkan 250 personel, Spanyol 1000 personel, Polandia 500 personel, dan Belgia 400 personel (Angkasa 2006:89). Sedangkan untuk negara Jerman dan Belanda akan membantu dalam pengamanan laut Libanon. Sedangkan untuk negara Amerika, tidak akan mengirimkan pasukannya. Karena, mengalami kerugian besar pada perang-perang sebelumnya di Beirut, sehingga Amerika akan membantu dalam hal logistik untuk pasukan UNIFIL.

Sedangkan untuk negara-negara Asia seperti Indonesia telah menyiapkan 4.276 personel, Malaysia menyiapkan satu Batalion Zeni, Bangladesh menyiapkan dua Batalion Zeni dan, Nepal menyiapkan 1000 personel (Angkasa 2006). Qatar mengirimkan 200-300

pasukannya. Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 dibagi menjadi 7 tahap pelaksanaan, yaitu:

1. Memonitor kesepakatan penghentian permusuhan di antara pihak-pihak yang bertikai
2. Mendampingi dan membantu pemerintah Libanon selama proses penggelaran pasukan Libanon (LAF) di Libanon Selatan. Hal itu dilaksanakan bersamaan dengan proses pengunduran pasukan Israel (IDF). Pemerintah Libanon dan Israel akan mengoordinasikan proses pengunduran pasukan di Libanon Selatan.
3. Membantu pelaksanaan dan koordinasi dalam proses pengunduran pasukan Israel, baik dengan pemerintah Libanon maupun Israel.
4. Memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil setempat serta, membantu mengamankan proses kembalinya masyarakat, baik yang telah mengungsi maupun yang telah terpisah dari keluarganya selama berlangsungnya perang sepanjang Juli sampai Agustus 2006.
5. Membantu pasukan LAF dalam proses mewujudkan zona wilayah bebas dari personel atau kelompok bersenjata beserta aset militer lainnya antara Blue Line dan Sungai Litani, kecuali aset militer dan senjata milik pemerintah Libanon dan personel UNIFIL.
6. Menyakinkan bahwa wilayah tanggung jawab yang telah diberikan tidak digunakan untuk berbagai bentuk kegiatan yang dapat memicu terjadinya kembali konflik di antara pihak-pihak yang bertikai.
7. Membantu pemerintah Libanon mengamankan garis batas antara Libanon dan Israel serta sejumlah daerah yang dapat dijadikan titik infiltrasi.

Rancangan tersebut diterima oleh Pemerintah Libanon dan disetujui oleh Hizbullah 12 Agustus 2006. Menanggapi Resolusi Dewan Keamanan PBB, sehari kemudian Israel mengadakan sidang kabinet mendadak. Kabinet Israel akhirnya menyetujui dan mengesahkan gencatan senjata dengan perolehan suara 24 mendukung dan satu abstain. Dengan demikian, secara resmi penghentian gencatan senjata berlaku secara efektif pada tanggal 14 Agustus 2006. Indonesia mengirimkan pasukan KONGA XXIII dan bergabung dengan UNIFIL melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian di Libanon Selatan. Pasukan KONGA terdiri dari TNI AD 576 orang, TNI AL 221 orang, TNI AU 37 orang, staf operasi Mabes TNI 2 orang, Puspen TNI 3 orang, Perwira TNI 1 orang, Satkomlek TNI 5 orang. Kendaraan tempur yang digunakan oleh pasukan KONGA terdiri dari alat berat, kendaraan tempur Kavaleri TNI AD, dan kendaraan bermotor. Kendaraan tempur Kavaleri terdiri dari V150 commando 5 unit, V150 AP 5 unit, V150 Intai 15 unit, VAB 14 unit, Panhard 16 unit, Recovery 1 unit. Kendaraan bermotor terdiri dari D Max Isuzu 10 unit, Tangki air 4 unit, Tangki BBM 2 unit, Truck Harpal 2 unit, TNI AL Ranpur Marinir BTR 80A 12 unit, dan Truck Liaz. Alat berat yang terdiri dari Back loader 1 unit, Fork lift 1 unit, dan Taft GT 2 unit.

F. Kejahatan Perang Israel terhadap Libanon

Dalam perang Israel-Lebanon tersebut, Israel telah melakukan berbagai bentuk pembantaian serta pelanggaran perang terhadap penduduk sipil Libanon. Di antaranya bisa dilihat selama perang 34 Hari pada Juli 2006 antara Israel versus Libanon. Israel telah melakukan pelanggaran udara, hampir setiap hari sepanjang bulan dan tahun yakni dengan menggempur sasaran-sasaran sipil Libanon dengan

pesawat-pesawat pengebomnya. Belum lagi, pembunuhan massal di Qana yang dikenal sebagai “*Qana Massacre*” yang masih teringat dalam memori penduduk Lebanon dan sebagian masyarakat dunia. Inilah beberapa catatan kejahatan perang Israel terhadap Lebanon yang menewaskan banyak penduduk sipil Lebanon (Koya, 2006).

Pesawat Israel mengebom sebuah gedung tempat bermukim pengungsi Lebanon yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Sebagian besar diantara mereka tewas. Bahkan jumlah korban dewasa dan anak-anak di bawah usia 13 tahun menunjukkan angka satu banding tiga. Menteri Kesehatan Lebanon memberikan angka secara resmi sesuai dengan surat kematian, laporan dari pemerintah lokal Lebanon, keluarga dan saksi mata yakni 1.123 tewas. Jumlah itu terdiri atas 37 orang militer dan polisi Lebanon, 894 orang sipil dengan identifikasi yang jelas, dan 192 tanpa identitas yang jelas. Sedangkan korban yang terluka berjumlah 4.409 orang. Sebagian dari mereka mengalami cacat permanen. Jumlah itu belum termasuk korban akibat ranjau dan cluster bomb, yang membunuh 29 warga sipil Lebanon dan mencederai lebih dari 219 orang termasuk 90 anak-anak.

Perang Lebanon pada tahun 2006 telah menewaskan ribuan orang dan membuat ratusan ribu lainnya dipaksa mengungsi. Dari pihak Lebanon dan Hizbullah, perang ini telah menewaskan 1.130 penduduk sipil, 3.600 penduduk sipil cedera parah, 800.000 penduduk sipil mengungsi, 36 pasukan Lebanon tewas, 100 pasukan Lebanon terluka parah, 400 tentara Lebanon tertangkap, 65 pasukan Hizbullah tewas, dan 40 pasukan Hizbullah tertangkap. Sedangkan dari pihak Israel, 95 pasukan IDF tewas, 350 lainnya terluka parah, 2 pasukan IDF tertangkap dan kemudian kembali dalam keadaan tewas, 1 kapal perang

tenggelam, 1 tank hancur, 41 penduduk sipil tewas, 1.293 penduduk sipil terluka parah, dan 300.000 penduduk sipil dipaksa mengungsi karena perang